



# RENCANA KERJA PERUBAHAN 2023

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI



TAHUN ANGGARAN  
**2023**



Jl. Jend. Basuki Rahmat Kota Baru Jambi  
Telp. 0741 - 40048

**KATA PENGANTAR**

*Bismillaahirrahmaanirrohiim*

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, pembuatan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan ketentuan dan dapat terlaksana dengan baik. Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi selama 5 (lima) tahun. Sehubungan dengan perubahan perangkat daerah maka juga terjadi perubahan rencana strategis instansi hal ini tidak terlepas dari perintah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun 2018-2023 memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran untuk perbaikannya sangat diharapkan dan sebelumnya kami tak lupa mengucapkan terima kasih. Semoga awal Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi kita semua, untuk mendukung terciptanya prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Jambi, Agustus 2023  
KERALA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KOTA JAMBI



Feradi, S.Sos, ME  
Pemula Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19700209 199003 1 002

DAFTAR ISI

	Hal.
<b>Kata Pengantar</b> .....	ii
<b>Daftar Isi</b> .....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP KOTA JAMBI TAHUN LALU</b>	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SATPOL PP KOTA JAMBI Tahun 2023	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SATPOL PP KOTA JAMBI .....	20
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SATPOL PP KOTA JAMBI..	23
2.4. Review terhadap Rancangan Kerja SATPOL PP KOTA JAMBI .....	27
2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan .....	27
<b>BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN</b>	28
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	28
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SATPOL PP KOTA JAMBI .....	28
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	29
<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	40

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Renja SATPOL PP KOTA JAMBI merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (8) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi merupakan unsur pendukung pelaksana teknis yang membantu Walikota dalam menegakkan Perda, SK Walikota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja SATPOL PP KOTA JAMBI.

Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan strategis kinerja merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan di antara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SATPOL PP KOTA JAMBI) sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini tahun rencana adalah tahun 2023. Selanjutnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 memuat Program/kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2024.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

### **1.2.1. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Satpol PP Kota Jambi**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 )
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

### *Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2023*

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Terkait;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
14. Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Satuan Polisi Pamong Praja.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2008 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Jambi.
19. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Jambi(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
20. Keputusan Walikota Jambi Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Jambi.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Satpol PP Kota Jambi tahun 2023 dimaksudkan untuk :

- a. Menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif;
- b. Merupakan penjabaran visi, misi dan program serta kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi, dengan memperhatikan Renstra, Rancangan Awal SATPOL PP KOTA JAMBI, Rancangan Awal RPJMD, dan RPJP Daerah serta memperhatikan Renja Kementerian/Lembaga;
- c. Tersedianya rumusan program strategi dalam skala prioritas yang merupakan indikasi program Satpol PP Kota Jambi ;

- d. Sebagai pedoman untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

### **1.3.2. Tujuan**

Rencana Kerja Satpol PP Kota Jambi tahun 2023 dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Dokumen perencanaan resmi bagi Satpol PP Kota Jambi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan Satpol PP Kota Jambi khususnya pembangunan tahunan daerah pada umumnya;
- b. Sebagai dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka menengah daerah;
- c. Pedoman kerja bagi Satpol PP Kota Jambi dalam melaksanakan penganggaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2023;
- d. Menjadi alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Satpol PP Kota Jambi pada setiap tahun anggaran.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bab IV RENSTRA dan RENJA Satpol PP Kota Jambi Pasal 27 ayat ( 3) dan ( 4) ; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP KOTA JAMBI TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SATPOL PP KOTA JAMBI Tahun 2023
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SATPOL PP KOTA JAMBI
- 2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SATPOL PP KOTA JAMBI
- 2.4. Review terhadap Rancangan SATPOL PP KOTA JAMBI
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

#### **BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SATPOL PP KOTA JAMBI
- 3.3. Program, Kegiatan Dan Sub kegiatan Tahun 2023

#### **BAB IV : PENUTUP**



## **B A B II**

### **Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SATPOL PP KOTA JAMBI Tahun 2023**

Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun 2023 terdiri dari 2 (Dua) program, 11 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan

A. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan tahun 2023 (n-1) adalah :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** : Melalui Kegiatan (1) Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, (6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Dengan target Kinerja masing–masing kegiatan 100% dan Realisasi...%
2. **Program Peningkatan Ketenraman dan Ketertiban Umum** : melalui Kegiatan (1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, (2) Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, (3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota. Dengan target masing-masing kegiatan 100% dan Realisasi....%

Kegiatan	Persentase
1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%
2. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	100%
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	100%
4. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
5. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
6. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%
7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
8. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

### *Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2023*

Selanjutnya tidak terdapat realisasi program/kegiatan yang melebihi dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai dengan tahun 2023 (n-1) pada Satpol PP Kota Jambi.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan diantaranya adalah program/kegiatan yang dimaksud ditiadakan dan dihilangkan dari KUA dan PPAS dikarenakan ketidakcukupan Anggaran Pemerintah Daerah untuk memenuhi seluruh rencana program/kegiatan yang diajukan Satpol PP Kota Jambi sehingga memerlukan skala prioritas.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra dan kinerja pelayanan Satpol PP Kota Jambi, adalah tidak terpenuhinya dan optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah dibuat. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah membuat skala prioritas dengan lebih mengutamakan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan urusan dari pada program/kegiatan non urusan.

Matrik analisis rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Satpol PP Kota Jambi sampai dengan tahun berjalan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**Formulir E.81 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017  
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RPJMD : Indikator ( Penyelesaian Jumlah Kasus Atau Pelanggaran PERDA Dan PERWAL= 80% )

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja		Target dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit (Bidang) Perangkat
				5	Rp	6	Rp	7	Rp	I		II		III		IV		12	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x 100%				
										8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp							
	Menurunkan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap PERDA Dan PERWAL	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	8,060,143,796	BB	12,128,481,666	BB	9,140,851,793	16.12%	1,473,914,363	46.93%	4,289,744,605	71.26%	6,513,460,986	95.48%	8,728,088,006	95.48%	8,728,088,006	20,856,569,672	67.22			
		1. Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	BB	148,616,267	BB	17,449,100	BB	272,241,700	15.05%	40,977,200	42.49%	115,665,300	64.75%	176,283,200	99.96%	272,126,700	99.96%	272,126,700	289,575,800	3.93			
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	65,495,787	4 Dokumen	9,079,400	8 Dokumen	155,872,800	15.32%	23,887,400	42.23%	65,819,400	63.43%	98,877,800	99.93%	155,757,800	99.93%	155,757,800	164,837,200	2.52	Sekretariat		
		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	1 Dokumen	2,500,000	1 Dokumen	0	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	0	2,500,000	0.00%	0	2,500,000	0.00	Sekretariat			
		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	1 Dokumen	1,331,000	1 Dokumen	0	0.00%	-	-	0.00%	-	0.00%	0	1,331,000	0.00%	0	1,331,000	0.00	Sekretariat			

Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2023

	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	1 Dokumen	1,506,000	1 Dokumen	0	0.00%	-	-	-	0.00%	-	0.00%	0	1,506,000	0.00	Sekretariat			
	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	1 Dokumen	1,331,000	1 Dokumen	0	0.00%	-	-	-	0.00%	-	0.00%	0	1,331,000	0.00	Sekretariat			
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	83,120,480	2 Dokumen	704,000	4 Dokumen	116,368,900	14.69%	17,089,800	42.83%	49,845,900	66.52%	77,405,400	100.00%	116,368,900	100.00%	116,368,900	117,072,900	1.41	Sekretariat
	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	3 Dokumen	997,700	3 Dokumen	0	0.00%	-	-	-	0.00%	-	0.00%	0	997,700	0.00	Sekretariat			
	<b>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tertib Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>5,566,506,674</b>	<b>100%</b>	<b>5,185,095,571</b>	<b>100%</b>	<b>5,455,571,996</b>	<b>18.43%</b>	<b>1,005,569,456</b>	<b>45.84%</b>	<b>2,500,903,445</b>	<b>73.02%</b>	<b>3,983,438,552</b>	<b>98.04%</b>	<b>5,348,492,624</b>	<b>98.04%</b>	<b>5,348,492,624</b>	<b>10,533,588,195</b>	<b>4.88</b>	
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	612 Orang/Bulan	5,207,018,460	49 Orang	4,929,075,571	612 Orang/Bulan	5,145,377,496	18.65%	959,509,456	46.14%	2,374,044,095	73.59%	3,786,364,202	98.33%	5,059,298,274	98.33%	5,059,298,274	9,988,373,845	1.92	Sekretariat

Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2023

	3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	186,240,000	37 Orang	256,020,000	2 Dokumen	215,160,000	15.04%	32,360,000	37.60%	80,900,000	60.16%	129,440,000	90.24%	194,160,000	90.24%	194,160,000	450,180,000	2.42	Sekretariat
	4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	173,248,214	37 Orang	0	1 Dokumen	95,034,500	14.42%	13,700,000	48.36%	45,959,350	71.17%	67,634,350	100.00%	95,034,350	100.00%	95,034,350	95,034,350	0.55	Sekretariat
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	32,238,960	100%	0	100%	44,509,000	11.68%	5,200,000	29.21%	13,000,000	49.50%	22,032,000	72.87%	32,432,000	72.87%	32,432,000	32,432,000	1.01	
	6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	32,238,960		0	1 Dokumen	44,509,000	11.68%	5,200,000	29.21%	13,000,000	49.50%	22,032,000	72.87%	32,432,000	72.87%	32,432,000	32,432,000	1.01	Sekretariat
	5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	100%	249,715,000	100%	281,788,000	100%	359,760,000	7.10%	25,527,900	94.18%	338,813,767	96.00%	345,363,767	96.00%	345,363,767	96.00%	345,363,767	627,151,767	4.95	
	2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	172,015,000	251 Stel	193,010,000	2 Paket	249,760,000	0.00%	-	99.91%	249,539,800	99.91%	249,539,800	99.91%	249,539,800	99.91%	249,539,800	442,549,800	2.57	Sekretariat
	6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Paket	77,700,000	4 Orang	88,778,000	20 Orang	110,000,000	23.21%	25,527,900	81.16%	89,273,967	87.11%	95,823,967	87.11%	95,823,967	87.11%	95,823,967	184,601,967	2.38	Sekretariat

Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2023

	6. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	100%	421,052,155	100%	328,317,896	100%	420,029,807	21.33%	89,601,225	54.86%	230,427,475	74.32%	312,166,136	99.29%	417,051,006	99.29%	417,051,006		745,368,902		19.74	
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,636,616	12 Jenis	39,236,550	1 Paket	16,928,500	29.20%	4,943,880	57.12%	9,668,780	89.73%	15,189,120	100.00%	16,928,500	100.00%	16,928,500		56,165,050		5.83	Sekretariat
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	62,154,405	40 Jenis	51,134,050	4 Paket	53,376,620	39.83%	21,258,028	57.67%	30,782,862	88.54%	47,257,431	99.96%	53,355,171	99.96%	53,355,171		104,489,221		1.68	Sekretariat
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,319,670	7 Jenis	23,612,823	1 Paket	23,939,300	43.96%	10,524,800	60.24%	14,421,550	99.49%	23,818,300	99.49%	23,818,300	99.49%	23,818,300		47,431,123		4.60	Sekretariat
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	13,559,887	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	96.67%	13,108,000	96.67%	13,108,000		13,108,000		0.00	Sekretariat
	8. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	17,890,000	803 Kotak	36,570,000	2 Laporan	16,540,000	0.00%	-	32.21%	5,328,000	65.56%	10,843,000	92.63%	15,320,500	92.63%	15,320,500		51,890,500		2.90	Sekretariat

Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2023

	9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	251,000,000	17 Kali	151,364,773	2 Laporan	224,300,000	19.07%	42,774,517	64.01%	143,572,683	74.32%	166,689,225	99.54%	223,269,825	99.54%	223,269,825	374,634,598	1.49	Sekretariat
	7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20,251,464	1 Orang	6,000,000	1 Dokumen	37,785,500	11.91%	4,500,000	33.49%	12,653,600	68.73%	25,969,060	99.64%	37,650,710	99.64%	37,650,710	43,650,710	2.16	Sekretariat
	8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	49,800,000	4 Orang	20,399,700	8 Orang	33,600,000	16.67%	5,600,000	41.67%	14,000,000	66.67%	22,400,000	100.00%	33,600,000	100.00%	33,600,000	53,999,700	1.08	Sekretariat
	7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	166,165,890	100%	251,683,799	100%	1,079,074,090	7.03%	75,900,000	60.01%	647,520,145	80.75%	871,305,900	87.57%	944,983,900	87.57%	944,983,900	1,196,667,699	13.57	
	2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional /Pengawasan Kepala Daerah atau Lapangan		0		0	6 Unit	770,000,000	0.00%	-	65.19%	502,000,000	84.71%	652,246,000	84.71%	652,246,000	84.71%	652,246,000	652,246,000	0.00	Sekretariat
	5. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	19,649,220	79 Unit	105,534,400	29 Unit	128,852,955	58.90%	75,900,000	66.47%	85,650,000	97.16%	125,189,755	97.16%	125,189,755	97.16%	125,189,755	230,724,155	11.74	Sekretariat

Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2023

	11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	2 Paket	36,000,000	25 Unit	9,999,990	0.00%	-	94.50%	9,450,000	94.50%	9,450,000	94.50%	9,450,000	94.50%	9,450,000	45,450,000	0.00	Sekretariat	
	8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	813,069,200	100%	5,416,148,800	100%	703,525,200	9.96%	70,047,382	25.88%	182,070,273	40.04%	281,667,231	80.06%	563,277,211	80.06%	563,277,211	5,979,426,011	13.95	
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	19,950,000	3 Surat	27,768,600	3 Laporan	29,450,000	5.60%	1,650,000	16.81%	4,950,000	24.28%	7,150,000	87.10%	25,650,000	87.10%	25,650,000	53,418,600	2.68	Sekretariat
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	231,000,000	1 Tahun	155,200,000	2 Laporan	192,500,000	14.82%	28,521,382	32.74%	63,030,273	51.44%	99,013,231	68.86%	132,556,611	68.86%	132,556,611	287,756,611	1.25	Sekretariat
	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	562,119,200	229 Orang	5,233,180,200	4 Laporan	481,575,200	8.28%	39,876,000	23.69%	114,090,000	36.44%	175,504,000	84.11%	405,070,600	84.11%	405,070,600	5,638,250,800	10.03	Sekretariat



Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2023

	9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	662,779,650	100%	647,998,500	100%	806,140,000	19.98%	161,091,200	32.42%	261,344,200	64.65%	521,204,200	99.78%	804,360,798	99.78%	804,360,798		1,452,359,298		5.19	
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0	6 Unit	147,990,800	6 Unit	0	-						0.00%	-	0.00%	0		147,990,800		0.00	Sekretariat
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	583,166,850	23 Unit	335,250,200	35 Unit	679,337,500	23.71%	161,091,200	37.02%	251,506,200	62.88%	427,163,200	99.85%	678,304,798	99.85%	678,304,798		1,013,554,998		1.74	Sekretariat
	4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	30,217,800	9 Unit	7,227,000	38 Unit	27,962,000	0.00%	-	35.18%	9,838,000	81.51%	22,793,000	99.49%	27,818,000	99.49%	27,818,000		35,045,000		1.16	Sekretariat
	5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49,395,000	1 Paket	86,190,000	1 Unit	27,500,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	98.15%	26,990,000	98.15%	26,990,000		113,180,000		2.29	Sekretariat

Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2023

	6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	1 Paket	71,340,500	1 Unit	71,340,500	0.00%	-	0.00%	-	99.87%	71,248,000	99.87%	71,248,000	99.87%	71,248,000	142,588,500	0.00	Sekretariat
	2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	79%	6,310,856,204	75%	1,098,751,529	76%	7,202,807,820	12.90%	929,136,200	38.78%	2,793,450,464	60.40%	4,350,609,015	98.84%	7,119,087,398	98.84%	7,119,087,398	8,217,838,927	10.93
	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	65%	5,690,779,857	100%	810,893,675	70%	6,338,571,620	13.94%	883,619,200	40.64%	2,576,045,464	62.04%	3,932,144,745	98.75%	6,259,552,378	98.75%	6,259,552,378	7,070,446,053	5.70
	2. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	240 Kasus	2,265,854,500	0	200 Kasus	2,447,505,000	15.13%	370,276,000	44.03%	1,077,686,132	67.50%	1,652,062,632	99.93%	2,445,869,632	99.93%	2,445,869,632	2,445,869,632	1.08	Trantib

Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2023

	3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10 Dokumen	213,517,500	0	10 Dokumen	185,086,950	13.12%	24,282,000	38.63%	71,505,000	58.96%	109,128,000	<b>98.67%</b>	182,626,238	<b>98.67%</b>	182,626,238	182,626,238	0.86	Trantib	
	4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	387,999,225	24 Kali	109,562,600	416,019,130	9.09%	37,823,000	31.84%	132,446,500	48.61%	202,219,551	<b>90.57%</b>	376,794,651	<b>90.57%</b>	376,794,651	486,357,251	1.25	Linmas	
	5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	120 Orang	510,027,292	5 Kali	196,098,476	229 Orang	357,736,900	16.83%	60,198,700	41.50%	148,476,200	60.55%	216,603,430	<b>99.93%</b>	357,498,930	<b>99.93%</b>	357,498,930	553,597,406	1.09	PK

Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2023

	6. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan	0	7 Kali	77,466,151	0	-	-	0.00%	-	0.00%	-	77,466,151	0.00	PK					
	9. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP Trantibum dan Linmas	0	1 Dokumen	25,024,835	0	-	-	0.00%	-	0.00%	-	25,024,835	0.00	Trantib					
	2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perwal	56%	383,711,809	100%	269,668,854	54%	417,788,000	7.94%	33,176,000	28.16%	117,657,500	55.39%	231,406,438	99.53%	415,837,988	99.53%	415,837,988	685,506,842	3.27
	1. Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota Yang Memuat Sanksi	Jumlah Sosialisasi Peraturan daerah dan Peraturan Walikota Yang Memuat Sanksi	0	3 Kali	17,148,101	0	-	-	0.00%	0	0.00%	0	17,148,101	0.00	PPD					

Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2023

	2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24 Laporan	100,939,340	16 Kali	26,315,200	24 Laporan	116,755,500	10.74%	12,541,000	38.15%	44,537,500	69.69%	81,364,000	99.61%	116,305,500	99.61%	116,305,500	142,620,700	1.41	PPD
	3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	36 Laporan	282,772,469	29 Kali	226,205,553	36 Laporan	301,032,500	6.85%	20,635,000	24.29%	73,120,000	49.84%	150,042,438	99.50%	299,532,488	99.50%	299,532,488	525,738,041	1.86	PPD
	3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	13 Orang	236,364,538	100%	18,189,000	11 Orang	446,448,200	2.76%	12,341,000	22.34%	99,747,500	41.90%	187,057,832	99.38%	443,697,032	99.38%	443,697,032	461,886,032	1.95	
	1. Pengembangan Kapasitas Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	236,364,538	1 Tahun	18,189,000	1 Laporan	446,448,200	2.76%	12,341,000	22.34%	99,747,500	41.90%	187,057,832	99.38%	443,697,032	99.38%	443,697,032	461,886,032	1.95	PPD

Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2023

Rata-rata capaian kinerja (%)	16,343,659,613	14.70%	2,403,050,563	43.34%	7,083,195,069	66.47%	10,864,070,001	96.96%	15,847,175,404	96.96%	15,847,175,404
Predikat kinerja											
rong keberhasilan kinerja:											
ambatan pencapaian kinerja:											
yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):											
yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):											



**PRADI, S.Sos, ME.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19700209 199003 1 002

Jambi, Dievaluasi

**SUHENDRI, SH, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 Nip. 19700404 199601 1 002

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SATPOL PP KOTA JAMBI**

Analisis kinerja pelayanan Satpol PP Kota Jambi menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018, dengan sasaran target sesuai dengan Rensrta Satpol PP Kota Jambi dan/atau berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Sub bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Satpol PP Kota Jambi berdasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal), maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) yang disesuaikan dengan dan mengacu pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Walikota Jambi Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023.
6. Keputusan Walikota Jambi Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Jambi.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Satpol PP Kota Jambi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### *Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2023*

Sasaran target indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal), maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci), harus disesuaikan pula dengan sasaran target pada Renstra Satpol PP Kota Jambi dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Program, kegiatan Dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 untuk mendukung percepatan pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi adalah sebagai berikut :

**Sumber : Permendagri Nomor 100 Tahun 2018**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
I.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Jumlah warga negara yang mendapat layanan Akibat Penegakan Perda dan Perkada	100%	2023	Satpol pp Kota Jambi



**Tabel. 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Perubahan Pelayanan SATPOL PP KOTA JAMBI**  
**Satpol PP Kota Jambi Kota Jambi**

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	INDIKATOR KINERJA KUNCI	Target Renstra SATPOL PP KOTA JAMBI				Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang Ditegakan		$\frac{\text{Jumlah Perda yang dan Perwal yang ditegakan}}{\text{Jumlah Perda dan Perwal yang memuat sanksi}} \times 100\%$			$\frac{17 \text{ Perda dan Perwal}}{21 \text{ Perda dan Perwal}} \times 100\%$ <p><b>81%</b></p>			81%		

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SATPOL PP KOTA JAMBI**

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Jambi, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Satpol PP Kota Jambi tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Satpol PP Kota Jambi.

Isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Jambi Berisikan uraian mengenai :

- (1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Satpol PP Kota Jambi dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Satpol PP Kota Jambi;
- (2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Jambi;
- (3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- (4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satpol PP Kota Jambi; dan
- (5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Sampai dengan tahun berjalan 2023 ini tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Satpol PP Kota Jambi 2018-2023 dalam hal pelayanan berkaitan dengan tugas, pokok, dan fungsi adalah rata-rata telah mencapai sekitar 92 %, yang berarti hampir seluruh kegiatan yang menyangkut tugas, pokok dan fungsi satpol PP Kota Jambi dalam memberikan pelayanan khususnya bidang ketenteraman, ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat telah berjalan dengan baik. Pelayanan yang dilakukan Satpol PP Kota Jambi masih berkisar pada :

- Penertiban Pedagang Kaki Lima, Pengemis, dan anak jalanan
- Patroli Trantibmas guna pengawasan dan penataan PKL
- Pemeriksaan dan Pengawasan tempat-tempat hiburan dan izin usaha tertentu.
- Pengamanan demo dan unjuk rasa yang bersifat insidentil
- Penjagaan aset-aset daerah, serta pengamanan, dan pengawalan kegiatan pemerintah daerah

Namun pelayanan tersebut masih bersifat rutin, saat ini sampai pada tindak lanjut yang sifatnya berkaitan dengan penerapan sanksi administrasi dan operasi yustisi yang berkoordinasi dengan pihak pengadilan dan kejaksaan sehingga mengakibatkan efek jera bagi pelanggar ketertiban umum dan pelanggar peraturan daerah. Sehingga

sering kali penertiban, penataan, pengawasan, dan pemeriksaan yang dilakukan menjadi mulai berfungsi dengan baik.

Tingkat pelayanan yang belum optimal ini juga dipicu oleh belum adanya kesatuan langkah para *stake holder* dalam menyikapi setiap permasalahan tramtibum untuk ditindaklanjuti pada penerapan sanksi administrasi yang di atur dalam Perda dan Perkada. Dan juga masih terlalu banyak kegiatan-kegiatan pelanggaran tramtibum justru di *backing* oleh orang-orang kuat baik dari kalangan birokrat maupun politisi.

Selanjutnya permasalahan dan hambatan yang dihadapi yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Jambi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Jambi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan terangkum dalam perincian sebagai berikut:

1. Permasalahan :

- Lemahnya kesadaran, kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Menguatnya gejala perilaku asusila, dan infiltrasi budaya asing, dan masih tingginya pelanggaran Perda dan Perkada.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.
- Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti : anak jalanan, gelandangan, pengangguran, dan pekerja seks komersial, anak punk,LGBT.

2. Hambatan :

- Belum terwujudnya penegakkan supremasi hukum dan HAM
- Tidak seimbangny jumlah personil Satpol PP Kota Jambi dengan pertambahan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum, dan tingkat pelanggaran perda yang terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, luasnya cakupan daerah karena perkembangan dan perluasan kota yang berimplikasi pada timbulnya kantong-kantong rawan gangguan trantibmas baru, sehingga rasio penanganan dan penyelesaian kasus baik jumlah maupun kualitasnya tidak dapat dicapai secara optimal.
- Kekurangan jumlah personil Satpol PP Kota Jambi juga berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan seluruh program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakkan perda sehingga harus dibuat skala prioritas. Akibatnya sulit untuk mewujudkan standar pelayanan minimal dan mengakomodir sistem penyelenggaraan trantibum dan penegakkan Perda yang baik.

### *Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2023*

- Terbatasnya jumlah aparatur personil Satpol PP yang memiliki kompetensi dan kapasitas dibidang PPNS dan Intelijen.
- Masih rendahnya dedikasi, loyalitas personil, dan kemampuan teknis dan operasional personil Satpol PP dalam menguasai dan memahami tugas, pokok, dan fungsi yang diemban. Hal ini sebagai akibat kurangnya pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan terhadap bidang tugas yang dihadapi, dan adanya kecenderungan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh sebagian oknum personil Satpol PP untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang kemudian dijadikan sebagai alasan untuk memenuhi rendahnya tingkat kesejahteraan yang diperoleh karena tidak seimbang volume pekerjaan dan resiko pekerjaan yang dihadapi.
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional di lapangan guna memperluas cakupan jangkauan pelayanan yang semakin besar seiring dengan perkembangan Kota.
- Masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait baik lintas sektoral maupun lintas vertikal dalam upaya pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan keputusan walikota.
- Kurangnya komitmen dari pejabat struktural di lingkungan Satpol PP Kota Jambi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan mengacu kepada Renstra dan Renja yang telah dibuat.
- Kurang tertatanya manajemen dan administrasi pelaporan dan hasil pelaksanaan tugas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak bisa diketahui tingkat pencapaian target yang telah diperoleh.
- Kurangnya SDM yang diperlukan di bidang perencanaan program dan kegiatan, sehingga selalu terlambat dalam penyelesaian pelaporan sebagai bahan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Dampak yang dapat ditimbulkan dari akumulasi permasalahan dan hambatan di atas apabila tidak direspon dengan bijak adalah bisa sampai pada tidak tercapainya target sasaran di bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satpol PP Kota Jambi kedepan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Keterbatasan anggaran, jumlah personil, sarana dan prasarana serta SDM yang memiliki kompetensi dan kapasitas justru membuat Satpol PP Kota Jambi harus lebih inovatif dan kreatif dalam menyusun dan menentukan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mensukseskan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Program dan Kegiatan yang disusun tersebut harus tepat pada sasaran dan mampu

### *Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2023*

mengakomodir dan mencakup seluruh bentuk pelayanan di bidang ketertiban, ketenteraman umum serta penegakkan perda yang dilaksanakan oleh Satpol PP. Penyusunan Kebijakan di bidang ketertiban, ketenteraman umum serta penegakkan perda sedapat-dapatnya telah melibatkan dan mengakomodir berbagai kepentingan dari para *stake holder*, sehingga Program dan Kegiatan yang terlaksana adalah benar-benar telah sesuai dengan arah pencapaian yang diharapkan.

Peluang yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Jambi dalam meningkatkan pelayanan adalah peningkatan struktur kelembagaan yang telah diakomodir dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, tugas perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP.

Selain itu Peraturan Pemerintah ini mensyaratkan pula harus adanya perubahan dalam struktur organisasi dan eselon Satuan Polisi Pamong Praja di seluruh Indonesia dan disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Permendagri diundangkan. Melalui Peraturan Pemerintah dan Permendagri dimungkinkan Satpol PP Kota Jambi untuk meningkatkan kelembagaannya menjadi Eselon II/b.

Hal ini sangat berarti bagi Satpol PP Kota Jambi dalam mengembangkan dan meningkatkan pelayanan yang akan dilakukan, khususnya dalam hal koordinasi dalam penyelenggaraan, pemeliharaan, ketenteraman, dan ketertiban umum, serta penegakkan perda dengan Kejaksaan, Pengadilan, dan TNI/POLRI.

Dari penjabaran dan uraian di atas, maka formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas untuk Satpol PP Kota Jambi pada tahun yang 2020 adalah sebagai berikut :

Penegakkan Peraturan Daerah dengan Operasi Yustisi Terpadu yang melibatkan unsur Kejaksaan, Pengadilan, TNI/ Polri dan Instansi Terkait yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Terciptanya suatu sistem penyelenggaraan dan pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal di bidang Ketertiban Umum dan Penegakkan Perda. Pertambahan Jumlah Personil Satpol PP Kota Jambi.
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional.

### *Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2023*

- Pertambahan Jumlah Aparatur SDM Polisi Pamong Praja yang memiliki kompetensi dan Kapasitas di bidang perencanaan, keuangan, PPNS, dan Intelijen.
- Tertib Administrasi Pelayanan dan Akuntabilitas Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- Terwujudnya supremasi hukum yang adil bagi semua pelanggar masalah tramtibum dan linmas.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal SATPOL PP KOTA JAMBI**

Berdasarkan pada evaluasi capaian kerja pembangunan Kota Jambi tahun lalu beserta proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2023, program indikatif di tahun 2023 yang bersifat lintas wilayah dan strategis dari RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023, telaah tujuan dan tahapan pembangunan dalam dokumen RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025, telaah arahan strategi pengembangan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Jambi 2015-2020, telaah prioritas RPJMN 2016-2019, analisis isu-isu kebijakan nasional, platform Kepala Daerah terpilih dan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023.

Berisikan uraian mengenai :

- (1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal Satpol PP Kota Jambi dengan hasil analisis kebutuhan;
- (2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- (3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Satpol PP Kota Jambi, misalnya : terdapat rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat pada rancangan awal Satpol PP Kota Jambi, atau program, kegiatan dan sub kegiatan namun besarnya berbeda;

Untuk Rencana Kerja (RENJA) Satpol PP Kota Jambi tahun 2023, bagian ini sudah mendapatkan porsi penjelasan dan dapat dikerjakan.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Satpol PP Kota Jambi kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Satpol PP Kota Jambi Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

- (1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan Program, Kegiatan Sub Kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- (2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Jambi;

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam renstra Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Ditjen PUM) pada Kementerian Dalam Negeri ada satu target terkait Satuan Polisi pamong Praja yang memerlukan dukungan provinsi dan Kabupaten/kota. Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundang – undangan yang ditarget pada tahun 2018 sejumlah 33 Provinsi, pada kenyataannya masih banyak provinsi yang berkapasitas kelembagaannya Satpol PP belum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Berbagai program prioritas tersebut didukung oleh rangkaian program pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah. Dalam hal ini dalam upaya mewujudkan Misi Kedua, yaitu : **Penguatan Penegakan Hukum, Tranmas Dan Kenyamanan Masyarakat**, maka program pembangunan yang akan dilakukan pada Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Sesuai dengan **Permandagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah**, Berdasarkan hasil Mapping program, kegiatan dan sub kegiatan adalah:

- (1) **Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.** Terdiri Dari 3 (Tiga) Kegiatan Dan 8 ( Delapan ) Sub Kegiatan.
- (2) **Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.** Terdiri Dari 8 ( Delapan ) Kegiatan, Dan 23 ( Dua Puluh Tiga ) Sub Kegiatan

Selanjutnya dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi periode 2018–2023 yang memuat pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Satpol PP terletak pada Arah kebijakan dari sasaran dan tujuan Misi-2.

#### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SATPOL PP KOTA JAMBI

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Jambi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Satpol PP Kota Jambi Tahun 2018 -2023.

##### 1. Tujuan

- Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

##### 2. Sasaran

- Optimalisasi penegakkan Perda dan Perkada

### 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Tahun 2023 terdiri dari :

#### 1. Program Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum: Indikator Program : Persentase penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap Perda dan Perwal.

1.1 Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator (Outcome) : Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pendanaan : APBD

Sub Kegiatan :

1.1.1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan cegah Dini. Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

Indikator (Output) : Jumlah Pencegahan Gangguan TrantibumJumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

Pendanaan : APBD

1.1.2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Indikator (Output) : Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan

Pendanaan : APBD

1.1.3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator (Output) : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Pendanaan : APBD

1.1.4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator (Output) : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pendanaan : APBD



### *Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2023*

1.1.5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Indikator (Output) : Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya  
Pendanaan : APBD

**1.2 Kegiatan : Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/WaliKota.**

Indikator (Outcome) : Persentase Penegakan PERDA dan PERATURAN WALIKOTA

Pendanaan : APBD

**Sub Kegiatan :**

1.2.1. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/WaliKota.

Indikator (Output) : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Pendanaan : APBD

1.2.2. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Indikator (Output) : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP

Pendanaan : APBD

**1.3 Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.**

Indikator (Outcome) : Jumlah Pembinaan PPNS

Pendanaan : APBD

**Sub Kegiatan :**

1.3.1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Indikator (Output) : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada

Pendanaan : APBD

## **2. Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

**Indikator Program : Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.**

**2.1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator (Outcome) : Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah

Pendanaan : APBD

**Sub Kegiatan :**

2.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Indikator ( Output ) : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
Pendanaan : APBD

2.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
Indikator ( Output ) : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
Pendanaan : APBD

**2.2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Indikator (Outcome) : Tertib administrasi keuangan  
Pendanaan : APBD

**Sub Kegiatan :**

2.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Indikator ( Output ) : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  
Pendanaan : APBD

2.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  
Indikator ( Output ) : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  
Pendanaan : APBD

2.2.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  
Indikator ( Output ) : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  
Pendanaan : APBD

**2.3. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Indikator ( Outcome ) : Tertib Administrasi Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah  
Pendanaan : APBD

**Sub Kegiatan :**

2.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  
Indikator ( Output ) : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  
Pendanaan : APBD

**2.4. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Indikator (Outcome) : Tertib administrasi kepegawaian  
Pendanaan : APBD

**Sub Kegiatan :**

2.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  
Indikator ( Output ) : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya  
Pendanaan : APBD

- 2.4.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator (Outcome) : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  
Pendanaan : APBD

**2.5. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Indikator (Outcome) : Tertib Administrasi Umum  
Pendanaan : APBD

**Sub Kegiatan :**

- 2.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator ( Output ) : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  
Pendanaan : APBD
- 2.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator ( Output ) : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  
Pendanaan : APBD
- 2.5.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Indikator ( Output ) : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  
Pendanaan : APBD
- 2.5.4. Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator ( Output ) : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  
Pendanaan : APBD
- 2.5.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator ( Output ) : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Pendanaan : APBD
- 2.5.6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator ( Output ) : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  
Pendanaan : APBD
- 2.5.7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator ( Output ) : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  
Pendanaan : APBD

**2.6. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator (Outcome) : Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Pendanaan : APBD

**Sub Kegiatan :**

- 2.6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Indikator (Output) : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan  
Pendanaan : APBD
- 2.6.2. Pengadaan Mebel  
Indikator ( Output ) : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  
Pendanaan : APBD
- 2.6.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Indikator ( Output ) : Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  
Pendanaan : APBD

**2.7. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Indikator (Outcome) : Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Pendanaan : APBD

**Sub Kegiatan :**

- 2.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Indikator ( Output ) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Pendanaan : APBD
- 2.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Indikator ( Output ) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  
Pendanaan : APBD
- 2.7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
Indikator ( Output ) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  
Pendanaan : APBD

**2.8. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Indikator (Outcome): Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Pendanaan : APBD

**Sub Kegiatan :**

- 2.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Indikator ( Output ) : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  
Pendanaan : APBD
- 2.8.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Indikator ( Output ) : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  
Pendanaan : APBD
- 2.8.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
Indikator ( Output ) : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi



TABEL 3.3  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI KOTA JAMBI  
2018-2023

KODE					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Lokasi	Rencana Tahun 2023		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		APBD KOTA	APBD PROV	APBN
										Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif			
1					2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12
1	05	02			2. Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum			Persentase penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap Perda dan Perwal	Kota Jambi	79%	6,153,156,724	-	80%	6,819,861,216	80%	13,639,722,431	APBD		
1	05	02	2.01		1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Jambi	65%	5,554,130,377	-	100%	6,109,543,415	100%	6,720,497,756	APBD		
1	05	02	2.01	01			1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Jambi	240 Kasus	2,244,854,500		528 Kali patroli Siaga Trantibum	2,469,339,950	528 Kali patroli Siaga Trantibum	2,716,273,945	APBD		
1	05	02	2.01	02			2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kota Jambi	20 Kasus	2,256,681,340		Skala Kecil=13 kali, Skala Sedang=9 Kali, Sakala Besar=3 kali, 171 Orang Anggota PTT	2,482,349,474	Skala Kecil=13 kali, Skala Sedang=9 Kali, Sakala Besar=3 kali, 171 Orang Anggota PTT	2,730,584,421	APBD		
1	05	02	2.01	03			3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Jambi	10 Dokumen	213,517,500		9 kali Kordinasi	234,869,250	9 kali Kordinasi	258,356,175	APBD		

Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2023

1	05	02	2.01	04		4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Jambi	4 Dokumen	358,573,745		16 Orang Linmas, 4 Orang Anggota PTT	394,431,120	16 Orang Linmas, 4 Orang Anggota PTT	433,874,231	APBD		
1	05	02	2.01	05		5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Jambi	120 Orang	480,503,292		15 Orang	528,553,621	15 Orang	581,408,983	APBD		
1	05	02	2.02			2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perwal	Kota Jambi	56%	302,111,809	-	100%	383,711,809	100%	767,423,618	APBD		
1	05	02	2.02	02		1. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/WaliKota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kota Jambi	24 Laporan	100,939,340		2 Kali	100,939,340	2 Kali	201,878,680	APBD		
1	05	02	2.02	03		2. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kota Jambi	36 Laporan	201,172,469		Skala Kecil=20 kali, Skala Sedang=15 Kali, Sakala Besar=5 kali, 7 Orang Anggota PTT	282,772,469	Skala Kecil=20 kali, Skala Sedang=15 Kali, Sakala Besar=5 kali, 7 Orang Anggota PTT	565,544,938	APBD		
1	05	02	2.03			3.Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Kota Jambi	13 Orang	296,914,538	-	100%	326,605,992	100%	653,211,984	APBD		
1	05	02	2.03	01		1. Pengembangan Kapasitas Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Kota Jambi	1 Laporan	296,914,538		9 Orang	326,605,992	9 Orang	653,211,984	APBD		

Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2023

1	05	02			1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Jambi	BB	8,231,322,850	-	100%	9,054,455,135	100%	18,108,910,270	APBD		
1	05	02	2.01		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Peningkatan Nilai AKIP	Kota Jambi	BB	159,358,127	-	100%	175,293,940	100%	350,587,880	APBD		
1	05	02	201	01		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Jambi	7 Dokumen	72,647,127		Renstra= 1 Dokumen, Renja= 1 Dokumen, Renja Perubahan =1 Dokumen, Makan	79,911,840	Renstra= 1 Dokumen, Renja= 1 Dokumen, Renja	159,823,680	APBD		
1	05	02	201	06		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Jambi	3 Laporan	86,711,000			95,382,100		190,764,200			
1	05	01	2.02		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tertib Administrasi Keuangan	Kota Jambi	100%	5,621,066,668	-	100%	6,183,173,335	100%	6,038,161,405			
1	05	02	2.02	01		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Jambi	612 Orang/Bulan	5,264,925,494		55 Orang ASN Dan 8 Orang Anggota PTT	5,791,418,043	55 Orang ASN Dan 8 Orang Anggota PTT	11,582,836,087			
1	05	02	2.02	03		2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Jambi	1 Dokumen	178,080,000			195,888,000		391,776,000			
1	05	02	2.02	04		3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Jambi	1 Dokumen	178,061,174			195,867,291		391,734,583			
1	5	1	2.03		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tertib Administrasi Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	kota Jambi	100%	27,084,960	-		29,793,456		59,586,912			
1	5	1	2.03	6		1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Dokumen	27,084,960			29,793,456		59,586,912			
1	05	01	2.05		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tertib Administrasi Kepegawaian	Kota Jambi	100%	249,715,000	-		274,686,500		549,373,000			
1	05	01	2.05	02		1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Jambi	3 Paket	172,015,000			189,216,500		378,433,000			
1	05	01	2.05	09		2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Jambi	1 Paket	77,700,000			85,470,000		170,940,000			



Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2023

1	05	02	2.03			5. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tertib Administrasi Umum	Kota Jambi	100%	421,052,155	-		463,157,371		926,314,741			
1	05	02	2.06	01		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Jambi	1 Paket		9,636,616			10,600,278		21,200,555			
1	05	02	2.06	02		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Jambi	5 Paket		62,154,405			68,369,846		136,739,691			
1	05	02	2.06	05		3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Jambi	1 Paket		10,319,670			11,351,637		22,703,274			
1	05	02	2.06	08		4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Jambi	1 Laporan		17,890,000		0	19,679,000	0	39,358,000			
1	05	02	2.06	09		5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Jambi	2 Laporan		251,000,000			276,100,000		552,200,000			
1	05	02	2.06	10		6. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Jambi	1 Dokumen		20,251,464			22,276,610		44,553,221			
1	05	02	2.06	11		7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Jambi	2 Dokumen		49,800,000		5 Orang CS	54,780,000	5 Orang CS	109,560,000			
1	05	01	2.07			6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi		100%	166,165,890	-		182,782,479		365,564,958			
1	05	01	2.07	02		1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Jambi	2 Unit		44,400,000			48,840,000		97,680,000			
1	05	01	2.07	05		2. Pengadaan Mabel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Jambi	6 Unit		19,649,220			21,614,142		43,228,284			
1	05	01	2.07	06		3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Jambi	7 Unit		146,516,670			161,168,337		322,336,674			

Renja Satuan Polisi Pamong Praja 2023

1	05	01	2.08		7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	100%	792,069,200	-	871,276,120	1,742,552,240				
1	05	01	2.08	01		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Jambi	3 Laporan	19,950,000		21,945,000	43,890,000			
1	05	01	2.08	02		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Jambi	3 Laporan	231,000,000		254,100,000	508,200,000			
1	05	01	2.08	04		4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Jambi	4 Laporan	541,119,200		595,231,120	1,190,462,240			
1	05	01	2.09		8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Jambi	100%	794,810,850	-	874,291,935	1,748,583,870				
1	05	01	2.09	02		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Jambi	35 Unit	715,198,050		786,717,855	1,573,435,710			
1	05	01	2.09	06		2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Jambi	14 Unit	30,217,800		33,239,580	66,479,160			
1	05	01	2.09	09		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Jambi	1 Unit	49,395,000		54,334,500	108,669,000			
									14,384,479,574	-	-	15,874,316,351	24,661,640,805			

Kota Jambi, 31 Desember 2022  
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
 Kota Jambi



Perini, S. Sos., ME  
 Pembina Utama Muda  
 Nip. 197002091990031002

## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Satpol PP Kota Jambi disusun dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan yang telah ditentukan dalam rencana awal RPJP Kota Jambi Bab 4 Penutup, yaitu sebagai berikut :

1. Renja Satpol PP Kota Jambi disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP Kota Jambi 2018-2023 dan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJP) Kota Jambi Tahun 2018-2023.
2. Renja ini diharapkan telah dapat menjabarkan Visi, Misi, dan Program Walikota Jambi terpilih 2018-2023 dan Visi, Misi Satpol PP Kota Jambi yang sesuai dengan tupoksi Satpol PP Kota Jambi.
3. Seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan dalam Renja 2023 akan dijamin pelaksanaan dengan sebaik-baiknya dan konsistensinya antara RPJP Kota Jambi dan Renstra Satpol PP Kota Jambi.
4. Renja yang disusun diharapkan telah mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki dan dipantau serta di evaluasi oleh Bappeda Kota Jambi untuk menjaga ke efektifan pelaksanaannya melalui Forum Satpol PP Kota Jambi dan Musrenbang Kota Jambi

**Agustus 2023**  
**Kepala Satuan**  
**Polisi Pamong Praja Kota Jambi**  
**Ferjadi, S.Sos, ME**  
**Pembina Utama Muda**  
**Nip. 19700209 199003 1 002**